

ANALISIS WACANA KRITIS TEKS PADA ARTIKEL TAHUN-TAHUN BERLIKU MEMBERANTAS KORUPSI DALAM BUKU PERLAWANAN SEHORMAT-HORMATNYA TERKAIT ALIH STATUS PEGAWAI KPK

Priharsa Nugraha, A. Rahman, H.I

Universitas Mercu Buana

priharsa@gmail.com; dr.a.rahman@mercubuana.ac.id

Abstrak. Salah satu konsekuensi perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah beralihnya status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada pelaksanaannya, proses peralihan tersebut memunculkan kontroversi saat Pimpinan KPK memutuskan untuk memberhentikan sejumlah pegawai karena tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Aneka perlawanan yang dilakukan, tak berhasil membatalkan putusan itu. Para pegawai yang dikeluarkan tersebut kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama IM57+, yang kemudian membuat sebuah buku berjudul Perlawanan Sehormat-hormatnya yang terdiri dari 25 artikel. Salah satu artikel dalam buku itu berjudul Tahun-tahun Berliku Memberantas Korupsi yang ditulis Yudi Purnomo, mantan pegawai sekaligus ketua Wadah Pegawai KPK. Penelitian ini dilakukan untuk mengkonstruksi wacana dalam artikel tersebut terkait alih status pegawai KPK dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yang meliputi dimensi struktur teks, praksis diskursif, dan praksis sosiokultural.

Kata Kunci: Komunikasi; Analisis Wacana Kritis; TWK

Abstract. One of the consequences of the amendment to the Corruption Eradication Commission Law is the transition of KPK employees to State Civil Apparatus (ASN). In its implementation, the transition process caused controversy when the KPK commissioners decided to dismiss a number of employees because did not pass the National Insight Test (TWK). Various resistances were carried out, but did not succeed in overturning the decision. The expelled employees then formed an organization called IM57+, which then created a book entitled Resistance of His Respect which consisted of 25 articles. One of the articles in the book is titled The Winding Years of Eradicating Corruption written by Yudi Purnomo, a former employee and chairman of the KPK Employee Forum. This research was conducted to construct the discourse in the article related to the transfer of the status of KPK employees using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis, which includes the dimensions of text structure, discursive practice, and sociocultural practice.

Keywords: Communication; Critical Discourse Analysis; TWK

PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantik polemik di tengah masyarakat. Salah satu perubahan kontroversial dalam Undang-Undang itu adalah penempatan KPK sebagai bagian rumpun eksekutif. Pada tahap awal pembentukannya, KPK adalah lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Konsekuensi lain dari adanya perubahan tersebut adalah tentang status pegawai KPK yang mesti beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kontroversi tak berhenti di situ. Pimpinan KPK menerjemahkan perubahan regulasi itu dengan menjadikan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status, yang berujung pada diberhENTIKANNYA 57 pegawai karena tidak lolos TWK. Muncul dugaan, tes tersebut hanyalah dalih untuk menyingkirkan orang-orang tertentu dari KPK, sehingga merebaklah perlawanan menentang pemberhentian itu, tak hanya dari pegawai yang diberhentikan, juga dari kalangan masyarakat sipil.

Para pegawai yang diberhentikan dengan alasan tidak lolos TWK tersebut lalu membentuk sebuah organisasi bernama IM57+. Mereka lalu mengeluarkan sebuah buku yang berisi sejumlah artikel dari sebagian dari mereka. Buku tersebut berjudul "Perlawanan Sehormat-hormatnya" berkolaborasi dengan AJI Jakarta.

Dalam buku tersebut, Yudi Purnomo menuliskan sebuah artikel berjudul "Tahun-tahun Berliku Memberantas Korupsi". Yudi Purnomo adalah salah satu pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak

lolos TWK yang juga Ketua Wadah Pegawai KPK hingga akhirnya dikeluarkan dari organisasi tersebut.

Artikel tersebut akan dianalisis menggunakan analisis wacana Norman Fairclough. Analisis wacana kritis Fairclough menyuguhkan analisis yang berupaya mencari hubungan antara teks yang sejatinya mikro dengan konteks masyarakat yang makro, dan konteks masyarakat serta ideologi penulis.

KAJIAN TEORI

Analisis Fairclough berusaha mengupas bagaimana nilai ideologi pemakai bahasa masuk dalam teks. Pada pandangan Fairclough, bahasa sebagai praktik sosial sejatinya menimbulkan implikasi, yakni pertama, wacana merupakan bentuk tindakan dimana bahasa direpresentasikan melihat realitas yang terjadi. Kedua, model mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana yang terancang dalam teks dengan struktur sosial. Fairclough menyusun analisis wacana kritis ini dengan tiga dimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural.

Dalam teori analisis wacana kritis, analisis wacana tidak hanya dipandang sebagai studi bahasa, juga sebuah upaya mengungkapkan maksud tersembunyi dari subjek yang mengemukakan maksud pernyataan. Analisis wacana kritis memiliki tujuan untuk mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung di balik kata-kata dalam teks atau ucapan dalam berbagai bentuk kekuasaan.

Ideologi yang terkandung dalam sebuah teks dapat berupa pernyataan sikap, pandangan, penilaian, maupun keyakinan sosial. Penyingkapan ideologi di balik teks itulah yang menjadi tugas utama dalam analisis wacana kritis

Pendekatan Fairclough menyatakan, wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang memproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain. Fairclough memahami struktur sosial sebagai hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan dan di lembaga-lembaga khusus yang terdiri dari atas unsur-unsur kewacanaan dan nonkewacanaan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggunakan paradigma kritis dengan objek penelitiannya adalah artikel berjudul “Tahun-tahun Berliku Memberantas Korupsi” karya Yudi Purnomo yang merupakan bagian dari Buku “Perlawanan Sehorat-hormatnya” yang diterbitkan AJI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough, penelitian memperhatikan tiga dimensinya, yaitu: teks, praksis sosial, praktik diskursif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan merupakan dari data-data yang telah terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu solusi dalam memecahkan permasalahan penelitian. Untuk menguji keabsahan, dilakukan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terhadap kosakata dilihat dari tiga nilai, yaitu pengalaman, relasional, dan ekspresi. Kosakata melihat bagaimana wacana memilih kosakata untuk menggambarkan sesuatu.

*“Pimpinan KPK **menyingkirkan** saya setelah mengabdikan 14,5 tahun atas dasar sebuah tes yang dinamakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang penuh **kegagalan**.”*

Pada kalimat itu, terdapat dua kosakata yang memiliki nilai berbeda. Kata “menyingkirkan” memiliki nilai pengalaman ideologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “menyingkirkan” diartikan dengan menjauhkan (sesuatu dari); menghindarkan; memindahkan dan sebagainya (supaya tidak menghalangi, membahayakan, dan sebagainya). Dalam konteks kalimat di atas, alternatif kata lain yang memiliki makna serupa adalah “memberhentikan” dan “memecat” yang lebih netral.

Pilihan kata “menyingkirkan” memiliki nilai pengalaman ideologis bagi penulis, yang menunjukkan bahwa penulis menganggap yang dialaminya merupakan tindakan menjauhkan supaya tidak menghalangi. Sehingga dapat diartikan bahwa penulis menganggap pimpinan KPK sengaja menggunakan TWK untuk menyingkirkannya.

Pada kosakata “kejanggalan”, memiliki nilai ekspresif, dalam hal ini ekspresif evaluasi negatif. Kosakata “kejanggalan” digunakan untuk menerangkan keadaan dari Tes Wawasan Kebangsaan.

Menurut KBBI, “kejanggalan” berarti keadaan janggal. Sedangkan kata “janggal” diartikan sebagai tidak sedap dipandang mata (karena letak atau susunannya tidak tepat dan sebagainya), tidak sedap didengar (karena iramanya, bunyinya tidak harmonis, dan sebagainya), atau tidak biasanya.

Penggunaan kosakata “kejanggalan” oleh penulis menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi penulis, Tes Wawasan Kebangsaan memiliki keanehan, tidak seperti biasanya, dan tidak normal. Pada level ini, tidak dapat ditemukan lebih detail mengenai kejanggalan tersebut, apakah pada kebijakan, proses, maupun isi tes itu sendiri.

*“Cita-cita saya bahwa KPK menjadi tempat **berjuang** hingga pensiun yaitu sampai 2043 berubah total ketika harus berhenti secara terpaksa.”*

Menurut KBBI, kata “berjuang” mengandung arti berlaga, memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga, berperang, berkelahi, berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu, dan berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya.

Secara nyata, penulis adalah seorang pekerja dan bekerja di KPK. Penggunaan kosakata “berjuang” yang diasosiasikan dengan KPK sebagai tempat memiliki nilai ideologis bagi penulis.

Penulis menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya di KPK bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah perjuangan. Ini sejalan dengan kosakata lain yang ditemukan pada kalimat lain di teks ini.

*“Masuk menjadi pegawai KPK tentu kebanggaan bukan saya saja tetapi juga keluarga dan tentu saja cara saya **mengabdikan** pada negara, sebab di KPK bukan sekadar menerima gaji, lebih dari itu, yang utama adalah **pengabdian**.”*

Pada kalimat di atas, penulis menganggap bahwa bekerja di KPK merupakan cara untuk mengabdikan kepada negara. Terdapat relasi makna hiponimi antara kosakata “berjuang” dan “mengabdikan” dimana makna kata tertentu yang tercakup dalam makna kata lainnya.

Selanjutnya,

*“Oh ya, **Pak Damanik** yang pernah mendapat penghargaan dari FBI atas jasanya membongkar kasus e-KTP juga **di-TWK-kan**.”*

Penggunaan kosakata “di-TWK-kan” bukan merupakan kosakata baku. Pemilihan kosakata tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur informal, berupa menciptakan istilah baru. Kosakata “di-TWK-kan” bisa dimaknai diberhentikan karena alasan tidak lolos TWK.

Dalam sejarah, penggunaan istilah-istilah seperti ini beberapa kali digunakan, seperti penggunaan kosakata “di-Munir-kan”, yang merujuk pada makna diperlakukan seperti Munir, seorang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh karena diduga membuat seseorang atau sejumlah orang berkuasa terusik.

Sama seperti kosakata, kajian gramatika juga dilihat dari tiga nilai, yaitu pengalaman, relasional, dan ekspresi.

Pada kalimat berikut:

“Pimpinan KPK menyingkirkan saya setelah mengabdikan 14,5 tahun atas dasar sebuah tes yang dinamakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang penuh kejanggalan.”

Pada nilai pengalaman, termasuk teori ketransitifan dalam proses material, yaitu proses yang melibatkan proses perbuatan (*doing*), proses kejadian (*happening*), dan proses perilaku (*behavioral*). Predikat “menyingkirkan” masuk kategori perbuatan.

Pada nilai relasional, kalimat itu juga mengandung pronomina persona, berkenaan dengan kehadiran diri penulis pada kata “saya”. Dari sisi modus kalimat, dapat dikategorikan sebagai ekspresi deklaratif karena bersifat memberikan informasi. Penggunaan kata “atas dasar” yang menyambungkan anak kalimat dapat dimasukkan sebagai modalitas kebenaran. Penulis menyampaikan penyingkirannya adalah karena hasil tes yang penuh kejanggalan.

Pada gramatika, ekspresi ditunjukkan dari modalitas ekspresif. Ekspresi kebenaran pada kalimat di atas terdapat pada “atas dasar” dan “yang” sebagai bentuk kebenaran bahwa penyingkiran penulis adalah karena TWK dan TWK adalah hal yang penuh kejanggalan.

Pada dua kalimat berikut:

“Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menerima aduan dari pegawai KPK menemukan 11 dugaan pelanggaran HAM. TWK juga jelas-jelas melanggar tata administrasi pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan kesimpulan penyelidikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI),

institusi pengawas lembaga pemerintah.”

Pada kalimat pertama, nilai pengalaman, termasuk teori ketransitifan dalam proses material. Pada kata “menerima” dan “menemukan” merupakan proses perbuatan (*doing*). Pada kalimat kedua, pada kata “melanggar” adalah proses kejadian (*happening*).

Pada nilai relasional, dari sisi modus kalimat, dikategorikan sebagai ekspresi deklaratif karena bersifat memberikan informasi pada dua kalimat tersebut, yaitu informasi bahwa Komnas HAM menemukan 11 dugaan pelanggaran HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyimpulkan adanya pelanggaran tata administrasi pemerintahan yang baik dan benar.

Terdapat relasi elaborasi interkalimat pada kalimat kedua. Penggunaan kata “yang” menggambarkan anak kalimat yang satu, yaitu “baik dan benar” menjadi penjelas untuk anak kalimat tata administrasi.

Pada dua kalimat tersebut, dikaitkan dengan kalimat sebelumnya masih memiliki peran yang sama, yaitu menjadi dasar pembenar tentang adanya penyingkiran yang dilakukan pimpinan KPK terhadap penulis.

Pada kalimat dua berikut:

*“Gabungan antara keputusan Komnas HAM dan Ombudsman ternyata sama sekali **tidak mengubah** hasil TWK. Bahkan pidato Presiden untuk tidak memberhentikan pegawai KPK karena alasan TWK tetap **tidak digubris** pimpinan KPK.”*

Kalimat tersebut mengandung nilai pengalaman dengan menggunakan kalimat negatif. Pada kalimat pertama pada “tidak mengubah” dan pada kata kedua pada “tidak memberhentikan”.

Negasi pada kalimat negatif, menurut Fairclough, adalah cara cara yang sangat bermakna dalam memperebutkan elemen konteks antarteks.

Pada kata “tidak mengubah”, mengungkapkan realitas dengan negasi manipulatif. Penulis ingin menyampaikan bahwa sebenarnya “Gabungan antara keputusan Komnas HAM dan Ombudsman” dapat atau seharusnya dapat mengubah hasil TWK.

Pada kata “tidak memberhentikan”, mengungkapkan realitas dengan negasi sesungguhnya. Yang dilanjutkan dengan gramatika pasif negatif “tidak digubris” sebagai respons terhadap anak kalimat sebelumnya.

Representasi antarkalimat dilakukan dengan memperhatikan dua kalimat atau lebih yang digabung sehingga dihasilkan anak kalimat yang lebih menonjol dari anak kalimat lain. Pada dua kalimat tersebut, menghasilkan anak kalimat yang menonjol sehingga menimbulkan suatu reaksi. Makna anak kalimat tersebut adalah pimpinan KPK tetap pada pendiriannya untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos TWK.

Fairclough melihat aspek gramatika mampu menampilkan bagaimana suatu kejadian dianggap sebagai sebuah peristiwa atau tindakan. Itu terlihat bagaimana penulis menggambarkan bahwa pimpinan KPK tetap memutuskan untuk mengeluarkan mereka meski terdapat putusan, simpulan, maupun arahan yang berbeda, termasuk dari Presiden.

Peristiwa yang ditampilkan adalah bagaimana pimpinan KPK tidak menggubris pendapat presiden untuk tidak memberhentikan begitu saja pegawai yang tidak lolos TWK. Sedangkan Presiden merupakan pejabat tertinggi dalam rumpun eksekutif, rumpun di mana KPK ditempatkan berdasarkan Revisi Undang-Undang KPK. Narasi tersebut dipilih penulis untuk mempresentasikan bahwa pimpinan KPK memiliki tendensi dalam hal memecat sejumlah pegawai.

Menurut Fairclough, teks punya struktur yang dibentuk dari unsur-unsur yang ditampilkan dalam urutan yang dapat diramalkan. Urutan unsur-unsur yang muncul umumnya tidak selalu logis.

Karena teks yang diteliti merupakan teks monologis, maka analisis hanya dapat dilakukan pada aspek pengurutan teks. Teks yang dibuat oleh penulis dibangun secara kronologi pada beberapa unsur-unsur yang dimiliki. Peristiwa atau keadaan penulis masuk KPK, Peristiwa atau keadaan penulis bekerja di KPK, Peristiwa atau keadaan penulis dikeluarkan dari KPK, Peristiwa atau keadaan penulis setelah dikeluarkan dari KPK

Pada aspek analisis praksis diskursif, dilakukan analisis terhadap bagaimana produksi dan konsumsi pada teks tersebut. Posisi penulis dan penerbit menjadi pijakan awal menentukan situasional yang menjadi proses produksi teks.

Dari sisi penerbit, buku yang berisi 25 artikel tersebut menjadi gambaran bagaimana mantan pegawai disingkirkan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sejumlah pegawai menceritakan keganjilan tes yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari KPK. Buku itu dijadikan wahana

mendokumentasikan pengalaman mantan pegawai KPK yang disingkirkan.

Dari sisi penulis artikel, Yudi Purnomo telah bekerja di KPK selama 14 tahun lebih ketika diberhentikan karena tidak lolos TWK. Selama di KPK, Yudi pernah menjadi fungsional di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan sebagai penyidik. Selain itu, Yudi merupakan Ketua Wadah Pegawai (WP) saat dirinya dikeluarkan. Saat ini bekerja sebagai Analis Hukum Ahli Madya di Kepolisian RI sebagai Anggota Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi.

Menurut penulis, tidak ada ketentuan khusus dalam penulisan artikel tersebut. Setiap penulis diberikan kebebasan dalam menuliskan apa saja yang berkaitan dengan pengalamannya di KPK dan peristiwa dikeluarkannya dari KPK. Penulis memilih menuliskan tentang pengalamannya selama bekerja di KPK, mulai dari bagaimana mengawalinya dan bagaimana itu harus berakhir.

“Bagi saya, menulis artikel ini adalah bagian dari upaya untuk mendokumentasikan sejarah perjalanan saya. Semua saya tulis berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri.”

Menurut penulis, adanya jarak dari peristiwa dirinya dikeluarkan dari KPK dengan proses penulisan memiliki pengaruh terhadap isi artikelnya. Ada sisi emosional yang berkurang. Karena menyangkut langsung tentang dirinya, penulis memiliki kepentingan langsung dengan isi artikel yang dituliskannya.

Dalam hubungan antara konteks situasi dengan tipe wacana, bahwa artikel yang ditulis ini dilakukan sebagai wujud perlawanan sosial oleh penulis dan penerbit, berupa pendokumentasian peristiwa pernah terjadi perlakuan terhadap sejumlah pegawai KPK secara diskriminatif. Penulis sebagai kontributor pada salah satu artikel dengan menggunakan bahasa sebagai wacana berekspresi.

Wacana perlawanan sosial terhadap ketidakadilan yang dinilai oleh penulis merupakan rentetan dari perlawanan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada posisi sebagai orang yang disingkirkan meski menilai diri tidak melakukan kesalahan dan kegagalan apapun, penulis menganggap telah terjadi praktik ketidakadilan. Perlawanan itu dilakukan dengan menggugat ke pengadilan, berekspresi di media sosial, bersuara di media massa, maupun mengadu kepada sejumlah instansi.

Praxis diskursif berkaitan dengan tindak ujar. Menurut Searle, tindak ujaran dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Pada konteks ini, yang terjadi adalah tindak ekspresif, yaitu tindak ujaran yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu.

Aspek praxis sosiokultural memperhatikan pemahaman secara intertekstual, dimana sebuah teks dibentuk dan membentuk praxis sosial. Pada aspek ini terbagi menjadi tiga level yaitu situasional, institusional, dan sosial.

Situasional. Pada saat menulis artikel ini, penulis dalam posisi sebagai pegawai di Polri dengan jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi. Sekitar lima bulan sejak dirinya dikeluarkan dari KPK. Saat dikeluarkan dari KPK, penulis diselimuti perasaan marah dan kecewa karena diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang.

Penulis menganggap telah terjadi praktik ketidakadilan terhadap dirinya dan rekan-rekannya yang dikeluarkan dari KPK. Menurutnya, salah satu yang membebannya adalah status atau stempel yang mungkin dicapkan orang kepada dirinya karena dikeluarkan karena tidak lolos TWK, yaitu sebagai orang yang tidak pancasilais.

Pelantikan pegawai yang lolos TWK yang dilakukan pada 1 Juni 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila dan pemberhentian mereka yang tidak lolos pada 30 September 2021 bertepatan dengan pemberontakan PKI, dimaknai penulis sebagai bagian dari upaya merendahkan dan mendeskreditkan mereka. Situasi ini yang membuat penulis sebisa mungkin memiliki keinginan untuk menyampaikan kepada publik melalui artikelnya, bahwa yang dialaminya bukanlah dikeluarkan karena tidak pancasilais, melainkan karena adanya upaya penyingkiran yang direncanakan.

Institusional. Penulis mengaku materi tulisannya merujuk kepada kesimpulan, keputusan, maupun kebijakan empat lembaga, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, Kepolisian, dan Presiden.

Penulis menyoroti bagaimana pimpinan KPK tidak menggubris arahan Presiden. Pada saat itu Presiden menyebutkan bahwa hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

Sosial. Peristiwa alih status pegawai KPK termasuk isu yang memenuhi ruang-ruang publik. Pada saat penulis menuliskan artikelnya, terdapat sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, termasuk di media sosial, yang merupakan kelanjutan dari prokontra Revisi Undang-Undang KPK pada 2019.

Dalam konteks TWK, telah ada wacana yang terbangun sebelumnya. Munculnya isu radikal dan taliban, yang disematkan kepada sejumlah pegawai KPK yang dianggap memiliki afiliasi kepada keyakinan tertentu. Isu yang digulirkan berlangsung cukup lama. Maka, saat peristiwa TWK terjadi, wacana taliban dan radikal ini dijadikan argumentasi pembenar.

Menurut Foucault, wacana merupakan istilah yang mewadahi semua bentuk kehidupan kultural. Taliban yang identik dengan kekerasan maupun keengganan berpancasila merasuki benak masyarakat, termasuk pelabelannya pada sejumlah orang di KPK.

PENUTUP

Analisis Wacana Kritis Fairclough berupaya menghubungkan antara teks dengan konteks sosial. Berdasarkan analisis teks terhadap artikel berjudul Tahun-tahun Berliku Memberantas Korupsi dapat disimpulkan bahwa pengungkapan ideologi dapat dilakukan dengan cara memiliki kosakata tertentu, termasuk dengan menciptakan kosakata baru. Tata bahasa yang dilakukan juga dapat merepresentasikan wacana yang ingin dibangun.

Pada Tahun-tahun Berliku Memberantas Korupsi, wacana perlawanan sosial ditunjukkan melalui pemilihan beberapa kosakata seperti “menyingkirkan”, “menjanggalkan”, “mengada-ada”, dan “target”.

Praxis diskursif yang terjadi dalam produksi teks memperlihatkan bahwa sejak awal menunjukan artikel dan buku ini untuk menjadi dokumentasi sejarah. Penulis yang merupakan pelaku sejarah memiliki koneksi kuat dengan isi artikel sehingga terdapat keterlibatan emosi.

Sebagai bagian dari praxis sosial, wacana merupakan efek dan penyebab. Sebab, tidak ada teks yang tidak terkait dengan teks sebelumnya. Pada buku ini, determinan situasional dan institusional sangat besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Khaled Jamel, H., Abdi, M., & Ilias Basheer, K. (2024). Critical Discourse Analysis of Trump’s Tweets on the Covid-19 Pandemic. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 4(1), 21–32
- Suryawati, Indah. (2021). Politik Entertainment Selebriti Parlemen Pusat Dalam Konstruksi Media Online (Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough), *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi* Vol.5 No.5 Juni 2021
- Ika Firdawati Sanger. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Media Sosial: Peringatan Karbala (Arbain) di Media Sosial. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 90–101
- Ikhsan, Y. (2022). Pembingkai Citra Polisi pada Tagar #PercumaLaporPolisi (Analisis Wacana Kritis Metode Norman Fairclough). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 217–224.
- Putri, R. M., Mayasari, M., & Nurkinan, N. (2024). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Film Barbie 2023 Sebagai Representasi Budaya Patriarki. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 566–574
- Nurhayati, E., & Sukarno (2022). Mengungkap Sikap Majalah Tanwirul Afkar dalam Menanggapi Kritikan BEM UI Terhadap Jokowi: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(02), 110-124
- Khotimah, Khusnul. (2024). Wacana Kritis Norman Fairclough Berita Media Massa Daring: Jepang Buang Limbah Nuklir. *Journal of Linguistics* Vol. 9, No. 1
- Ananda Dwi Asri, & Nurhayati, N. (2024). Ideologi Konsumerisme pada Poster Iklan Minuman: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 691-700
- Apriliani, Riski. (2022) Critical Discourse Analysis Norman Fairclough Pidato Sri Sultan

- Hamengkubuwono X dalam Merespon Pandemi COVID-19. *Jurnal IMPRESI* Volume 3 Nomor 2
- Cenderamata, Rengganis Citra, Damayanti, Nani (2019) Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring. *Jurnal Literasi* Vol. 3 Nomor 1
- Sasmitha, N. W. D. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Stand-Up Comedy Mamat Alkatiri pada Program "Somasi". *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3 (1): 44-58
- I. N. Azizah (2020) Gender, Ideologi dan Kekuasaan dalam Video VICE Indonesia yang berjudul Polemik Poligami di Indonesia: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, Nusa: *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, vol. 15, no. 3, pp. 409-418, Aug. 2020
- Mudiawati, R. C., Hudyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(3), 739-762.
- Azma, S. F. N., Ansorayah, S. & Mayumi, I. (2023), Analisis Wacana Kritis Fairclough dalam Wacana Pilpres 2024 (Studi Kasus Berita di Instagram @Pinterpolitik). *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 4 (2): 45-53.